

MODUL KEBIJAKAN PUBLIK



Penulis :

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si
Hendra Sukmana, M.KP

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan mutu laboratorium kebijakan publik dan Manajemen Pelayanan Publik dengan tepat waktu. Melalui modul laboratorium kebijakan publik dan Manajemen Pelayanan Publik diharapkan dapat menjadi bekal tambahan bagi mahasiswa guna untuk memperluas serta meningkatkan pengetahuan mengembangkan kreativitas dan mempertajam tingkat analisis mahasiswa dalam bidang kebijakan publik serta dalam bidang merumuskan kebijakan publik, mengimplementasikan kebijakan publik, mengevaluasi kebijakan publik, ataupun dalam menganalisis setiap kebijakan yang ada.

Dalam model laboratorium kebijakan publik dan Manajemen Pelayanan Publik ini berisikan ringkasan serta materi-materi praktikum kebijakan publik mulai dari tahap formulasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, sampai dengan tahap analisis kebijakan publik. Selain itu dalam modul ini juga disertai dengan lembar kerja dan lembar tugas bagi mahasiswa, sehingga dengan harapan dapat menjadi alat evaluasi atau alat ukur tingkat pengetahuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah kebijakan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada suami, anak, teman-teman, serta pihak-pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan modul praktikum kebijakan publik ini penulis juga menyadari bahwa masih banyak membutuhkan saran dan masukan dari para pembaca guna untuk penyempurnaan modul ini.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
MODUL 1 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Formulasi Kebijakan Publik	1
B. Tahapan Formulasi kebijakan.....	2
C. Fase Perumusan Masalah Kebijakan	8
RANGKUMAN	9
PRAKTIKUM	10
DAFTAR PUSTAKA	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Formulasi Kebijakan	3
Gambar 1. 2 Fase Perumusan Masalah Kebijakan	9

A. Formulasi Kebijakan Publik

Pembuatan (perumusan)kebijaksanaan negara atau yang sering disebut dengan formulasi kebijakan publik, bukanlah sebuah pekerjaan mudah dan sederhana (Islamy, 2004). Dimana pekerjaan ini membutuhkan para pakar atau para ahli dalam rangka memikirkan teknik-teknik yang paling tepat yang digunakan untuk merumuskan setiap kebijakan yang akan dibuat.

Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahapan berikutnya pada proses kebijakan publik. Widodo (2007) mengemukakan ketika proses formulasi tidak dilaksanakan dengan tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan bisa mencapai tataran optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan tadi tidak bisa diimplementasikan (unimplementable). Akibatnya apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sprei sehingga masalah publik yang menemukan di masyarakat juga tidak bisa dipecahkan. Dan bukankah pada hakikatnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang dilakukan oleh para pemimpin atau administrator baik pada organisasi publik maupun organisasi swasta. Menurut Islamy (2004), dalam proses perumusan kebijakan khususnya kebijakan publik (negara) seorang administrator publik tidak boleh hampa nilai atau (*value free*) tetapi sebaliknya, Dalam merumuskan kebijakan publik seorang administrator harus syarat dengan nilai (*value laden*). tentunya administrator publik di harapan akan lebih banyak memperhatikan kepentingan publik, sehingga pengertian "publik" dalam administrasi publik akan menjadi lebih bermakna.

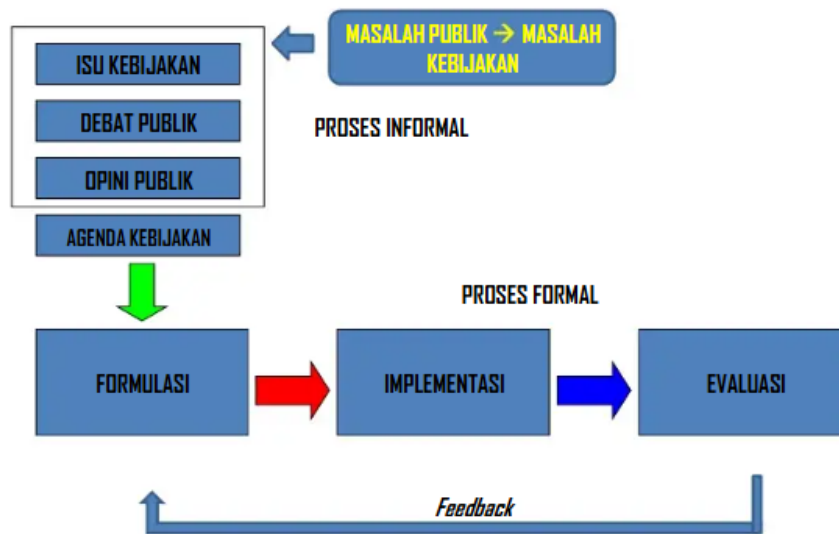
Masalah yang telah masuk pada rencana kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah atau kasus didefinisikan guna dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah berdasarkan cara yang banyak sekali ataupun pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya menggunakan usaha pada suatu kasus untuk bisa masuk pada rencana kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, tiap-tiap cara bersaing untuk bisa dipilih menjadi kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah yang dikaji.

Sebuah harapan besar dimana kebijakan publik dibuat bukan atas nama "kepentingan publik" semata tetapi kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan atau memberikan sebuah solusi atas segala masalah yang terjadi masyarakat. Selain itu yang perlu diingat juga bahwa kebijakan publik dibuat untuk memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk memenuhi keinginan dan tuntutan sebagian masyarakat (kelompok-kelompok kepentingan tertentu).

B. Tahapan Formulasi kebijakan

Tahapan-tahapan proses kebijakan publik sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, biasanya secara teknis hanya dibedakan dalam tiga tahapan yaitu (1) Policy formulation, (2) Policy implementation dan (3) policy evaluation (Joko Widodo, 2007 :43). Sebagaimana berdasarkan Permenpan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi Kebijakan Pelayanan Publik, proses perumusan kebijakan harus dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis bukti. Tahapan dalam formulasi kebijakan meliputi, penetapan isu kebijakan, membentuk tim penyusunan formulasi kebijakan, melaksanakan tugas pra kebijakan, proses publik pertama, proses publik kedua, proses publik ketiga, proses publik keempat, merumuskan draft final pertama, menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus, merumuskan draft final kedua dan terakhir pengesahan (atau pelanjutan ke langkah legislasi).

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK



Gambar 1. 1 Tahapan Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi kebijakan ini merupakan tahapan yang sangat penting, manakala ini tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, maka hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan secara optimal. Pada tahap ini paling tidak terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui yaitu : tahap identifikasi masalah, agenda setting, policy problem formulation dan tahap policy desing. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Identifikasi masalah (Problem Identification)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk lebih memahami dan mengenali permasalahan yang akan dijadikan sebagai dasar kebijakan. Untuk itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan situasi masalah dengan cara melakukan pencermatan atau mengenali setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Salah satu metode yang digunakan untuk memahami masalah itu adalah dengan menggunakan iceberg theory atau teori gunung es. (Joko Widodo, 2007 :45). Menurut teori ini pemahaman terhadap masalah itu

diawali dari adanya kejadian-kejadian (events) yang mengemuka di masyarakat, kemudian dari kejadian itu dapat dikemukakan apa yang menjadi kecenderungan atau pola perilaku (pattern of behavior) dari peristiwa itu. Atas dasar perilaku yang sama ini, kemudian bisa ditemukan apa yang menjadi struktur sistemis (systemic structure) permasalahan masyarakat tersebut, setelah itu dapat ditemukan akar permasalahannya (Mental models) yang merupakan kesimpulan dari peristiwa yang satu dengan yang lainnya yang merupakan permasalahan masyarakat. Berdasarkan akar masalah itu, maka dapat ditentukan kerangka intervensi strategis (desain kebijakan) yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu.

b) Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Agenda setting adalah merupakan kegiatan untuk membuat masalah public (public problem) menjadi masalah kebijakan (policy problem). Agenda diartikan oleh Jones (1984) sebagai “a term commonly used to portray those issues judged to require public action”. Artinya agenda adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Sementara itu, Darwin (1995) mengartikan agenda sebagai suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. (Joko widodo, 2007: 53). Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson, secara runtut terdiri atas: : Private Problem, public problem, issues, systemic agenda, dan institusional agenda, (Ibidem). Dengan demikian penyusunan agenda diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat, kemudian masalah itu dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai suatu masalah pribadi (private problem). Masalah privat ini merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat

secara langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (public problem). Masalah public ini diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Dari masalah publik itu kemungkinan akan berkembang menjadi isu kebijakan (issues policy) yang diartikan oleh Jhon (1984) sebagai problema public yang saling bertentangan dan menimbulkan konflik satu sama lain (controversial public problem). Isu ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (policy action) terhadap suatu masalah publik, sehingga isu kebijakan tidak hanya memandang ketidaksepahaman mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan begitu, isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi, dan evaluasi masalah (William Dunn, 1998: 97). Isu kebijakan tadi kemudian akan mengalir masuk kedalam agenda pemerintah (government agenda) dan kemudian menjadi agenda kebijakan. Agenda pemerintah ini merupakan sejumlah daftar masalah dimana para pejabat publik menaruh perhatian yang serius pada waktu tertentu. Pada agenda pemerintah itulah yang oleh Cobb dan Elder dibedakan menjadi dua macam, yaitu agenda sistemik (systemic agenda) dan agenda institusional (institutional agenda). Agenda sistemik ini merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut berada dalam yurisdiksi pemerintah, sementara itu. Sementara itu agenda institusional merupakan serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas (Joko Widodo, 2007: 55).

c) Formulasi Masalah Kebijakan Publik

Persoalan yang mendasar dalam merumuskan kebijakan publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah merumuskan masalah kebijakan (policy problem). Proses merumuskan masalah kebijakan ini menurut William Dunn dibedakan menjadi empat macam fase yang saling tergantung satu dengan yang lainnya yaitu: Pencarian masalah, Pendefinisian masalah, Spesifikasi masalah, dan Pengendalian masalah (Dunn, 1998: 244, bandingkan dengan Subarsono, 2005: 29) Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada sesuatu yang salah kemudian dilakukan scanning (pengenalan masalah). Dari situasi masalah tadi kemudian dicari masalah, selanjutnya lahirlah peta masalah itu. Biasanya yang didapat adalah setumpuk masalah yang saling terkait yang belum terstruktur inilah yang kemudian disebut sebagai peta masalah. Setumpuk masalah tersebut, dapat dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Hasil dari pendefinisian setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substansif yang kemudian dilakukan spesifikasi terhadap masalah substansif itu yang selanjutnya menghasilkan masalah formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara spesifik dan jelas.

- d) Mendesain Kebijakan (Policy Design) Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan menjadi masalah formal tadi kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut. Mustofadidjaja (2003) mengemukakan terdapat tujuh langkah (tahapan) dalam melakukan analisis kebijakan Yaitu :
- 1) Tahap Pengkajian Persoalan, tujuannya untuk menemukan dan memahami hakikat permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang

dihadapi oleh organisasi. Tahap ini menghendaki perlunya merumuskan masalah yang dihadapi oleh organisasi secara jelas dan tegas.

- 2) Tahap Penetapan Tujuan dan Sasaran Kebijakan, setiap kebijakan biasanya bertujuan untuk mencapai kebaikankebaikan lebih banyak dan mencegah timbulnya keburukankeburukan atau kerugian- kerugian semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan dan sasaran intervensi kebijakan perlu ditetapkan terlebih dahulu jelas dan tegas, agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam merumuskan alternatif intervensi apa yang diperlukan dan dapat dijadikan standar penilaian berhasil tidaknya langkah intervensi yang dilakukan. Jika kebijakan yang dibuat terhadap masalah yang diintervensi mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai maka intervensi yang dilakukan itu berhasil, namun bila sebaliknya maka dapat dikatakan gagal.
- 3) Penyusunan Model, penyusunan model ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan intervensi mana yang harus dipilih. Setelah berhasil menetapkan model ini, tahap selanjutnya memilih alternatif kebijakan terhadap masalah yang dihadapi.
- 4) Perumusan Alternatif Kebijakan, alternatif kebijakan ini merupakan sejumlah alat atau cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, di sinilah kita akan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul baik bersifat positif maupun negatif dari alternatif kebijakan yang telah ditetapkan. Setelah berhasil mengidentifikasi alternatif intervensi, tahapan selanjutnya adalah memilih dan menetapkan alternatif kebijakan intervensi yang mempunyai peluang yang sangat besar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran masalah yang ditetapkan.
- 5) Penentuan Kriteria Pemilihan Alternatif Kebijakan, tahap ini ditentukan

kriteria atau parameter apa yang dapat digunakan untuk memilih alternatif langkah apa yang perlu dilakukan. Di sinilah beberapa dimensi akan diperhatikan baik dimensi sosial, politik, ekonomi maupun budaya.

- 6) Penilaian Alternatif Kebijakan, tujuan penilaian alternatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas, efisiensi dan visibilitas dari setiap alternatif kebijakan yang diajukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- 7) Perumusan rekomendasi kebijakan, setelah diketahui alternatif kebijakan yang penilaiannya baik, langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi alternatif kebijakan untuk masalah yang dihadapi. Pada tahap ini sangat diperhatikan hasil dari proses penilaian terhadap alternatif kebijakan yang dibuat sehingga aspek teknis yang meliputi aspek visibilitas efisien dan efektif dari berbagai dimensi baik secara ekonomis tidak terlalu banyak membutuhkan biaya, secara politik mempunyai dukungan yang kuat serta tingkat urgensi konfliknya relatif kecil serta secara sosial administratif mempunyai kemungkinan besar untuk dapat dilaksanakan. Jika penilaian terhadap alternatif kebijakan itu memperoleh dukungan yang baik dari masyarakat maka sebaiknya dijadikan sebagai alternatif kebijakan. (Joko Widodo, 2007: 71- 77)

C. Fase Perumusan Masalah Kebijakan

Fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal ini akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, maka akan dapat berakibat fatal. Untuk itu, tidak jarang banyak kebijakan publik yang pada akhirnya malah menyengsarakan dan bukan berpihak pada rakyat. Mengingat

pentingnya fase ini, maka William Dunn menyebutkan setidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: problem search (pencarian masalah), problem definition (pendefinisian masalah), problem specification (menspesifikasi masalah), dan problem sensing (pengenalan masalah) (William N. Dunn, 1999:226). Berikut adalah fase perumusan masalah kebijakan.



Gambar 1. 2 Fase Perumusan Masalah Kebijakan

Sebelum adanya perumusan kebijakan atau membuat kebijakan para peneliti harus mencari awal permasalahan yang ada, para analisis juga harus dapat membedakan antara masalah publik dengan masalah privat. Selain itu para analisis kebijakan harus siap dihadapkan dengan metammasalah. Selain itu tahapan selanjutnya yaitu mendefinisikan sebuah masalah tahapan ini merupakan penganalisis dari metama salah ke masalah subtantif. Analisis dapat merumuskan masalah tersebut lebih ke formal dan lebih terperinci dan juga spesifik. Setelah sebuah masalah dispesifikasikan maka pengenalan masalah menjadi tahap selanjutnya dalam tahap ini kesulitan akan menghampiri pembuat kebijakan kesulitan terjadi karena ketidaksesuaian masalah substantif dengan representasi formal dari masalah yang ada.

RANGKUMAN

Formulasi kebijakan publik merupakan tahap awal dan sangat penting

dalam proses kebijakan publik. Tahapan ini melibatkan identifikasi dan perumusan masalah publik yang akan dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Menurut para ahli seperti Islamy dan Joko Widodo, proses ini tidaklah sederhana karena membutuhkan keahlian, nilai-nilai publik, serta pendekatan sistematis dan berbasis bukti. Jika formulasi tidak dilakukan secara tepat, kebijakan yang dihasilkan cenderung sulit diimplementasikan dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan publik secara efektif.

Secara umum, proses formulasi kebijakan dimulai dari identifikasi masalah melalui pemetaan situasi dan analisis akar permasalahan, misalnya dengan teori gunung es. Setelah itu, masalah diangkat menjadi agenda kebijakan yang menuntut tindakan pemerintah. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah secara sistematis melalui tahapan pencarian, pendefinisian, spesifikasi, hingga pengenalan masalah. Setelah masalah dirumuskan, tahap desain kebijakan dilakukan dengan menyusun tujuan, alternatif kebijakan, serta menilai efektivitas dan efisiensi dari masing-masing pilihan untuk kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi.

Permenpan Nomor 4 Tahun 2007 juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam formulasi kebijakan pelayanan publik, dengan melibatkan proses publik yang terbuka serta evaluasi berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, formulasi kebijakan publik menjadi dasar utama dalam menciptakan kebijakan yang solutif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

PRAKTIKUM

A. Judul Praktikum:

Merancang Kebijakan Publik Berdasarkan Isu yang Terjadi di Lingkungan Sekitar

B. Tujuan Praktikum:

Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu publik di lingkungan sekitarnya dan menyusun formulasi kebijakan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis bukti sesuai dengan tahapan formulasi kebijakan dalam Permenpan No. 4 Tahun 2007.

C. Langkah-Langkah Praktikum:

1. Identifikasi Isu Publik

Carilah **satu isu nyata** yang terjadi di lingkungan sekitar Anda (kampus, desa, kota, atau wilayah tempat tinggal). Isu tersebut harus memenuhi kriteria sebagai **masalah publik**, bukan masalah privat.

Contoh isu: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Analisis dan Formulasi Masalah

Lakukan analisis terhadap isu tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. **Problem Identification:** Jelaskan secara ringkas latar belakang dan data pendukung dari masalah yang Anda pilih.
- b. **Agenda Setting:** Uraikan bagaimana isu tersebut bisa diangkat sebagai agenda kebijakan publik.
- c. **Problem Formulation:** Tentukan inti masalah yang akan dipecahkan dan rumuskan dalam bentuk masalah kebijakan.
- d. **Policy Design:** Susun alternatif kebijakan yang bisa diambil. Kemudian pilih satu alternatif dan rumuskan dalam bentuk kebijakan publik.

3. Susun Dokumen Singkat Formulasi Kebijakan

No	Komponen Formulasi Kebijakan	Isi Penjelasan
1	Judul Isu/Kebijakan	(Tulis secara singkat dan jelas)
2	BAB I PENDAHULUAN	(Tuliskan konteks masalah dan data yang mendukung) 1.1 Latar belakang umum isu 1.2 Konteks daerah 1.3 Gambaran singkat urgensi
3	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2.1 Definisi agenda setting 2.2 Faktor yang mempengaruhi agenda 2.3 Sumber teori (deskriptif, bukan komparatif)
4	BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA	(Tentukan masalah kebijakan secara spesifik) 3.1 Uraian 3 isu yang ditemukan (Didukung Sumber dan bukti) 3.2 Dampak sosial 3.3 Tabel penilaian isu 3.4 Alasan memilih 1 isu 3.5 Aktor terdampak 3.6 Data pendukung 3.7 Kelayakan sebagai agenda kebijakan
5	BAB IV PENUTUP	4.1 Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya. 2018. Keijakan Publik. Pustaka Setia: Bandung.
- Aziz, Asep Abdul, et al. "Model Analisis Kebijakan Pendidikan." Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah 4.2 (2020): 192-201.
- Dunn, William N., penulis. Analisis kebijakan publik: pendekatan terpadu.
- Garceau, Oliver; Easton, David (1953-09). "The Political System: An Inquiry into the State of Political Science". Political Science Quarterly. 68 (3): 434. doi:10.2307/2145610.
- Grindle, Merilee S., (ed). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Pricetown University Press
- Lasswell, Harold D. (Harold Dwight), 1902-1978, author. Power and society : a framework for political inquiry.
- Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik
- Novitasari, Indah. "BUKU MATERI PEMBELAJARAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK." (2021).
- Nugroho Riant. 2017. Public Policy. PT Elex Media Komputindo : Kompas Gramedia
- Rinfret, Sara; Scheberie, Denise; Pautz, Michelle (2018). "Bab 2: Proses Kebijakan dan Teori Kebijakan". Kebijakan Publik: Sebuah Pengantar Ringkas. Publikasi SAGE. hlm. 19–44.
- Ronan, William J. (1941-07). "FRIEDRICH, CARL J., dan EDWARD S. MASON (Eds.). Kebijakan Publik. Vol. II, hal. viii, 458. Cambridge, Mass.: Universitas Harvard, 1941.
- Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi 2
- Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." Sawala: Jurnal Administrasi Negara 4.3 (2016).

- Suwitri, Sri. "Konsep dasar kebijakan publik." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2008).
- Taufikurokhman. 2014. Kebijakan Publik. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Wibawa, Samudera, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Konsep. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Y. abdoellah, Awan, Rusfiana, Yudi. 2016. Teori dan Analisis KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung: Alfa